



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 867/VI/2015

III/JUNI 2015



Pemerintah Harus Sidak dan Keluarkan Perpres



Pemerintah Harus Sidak dan Keluarkan Perpres



Tim Komisi VI DPR kunjungi Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan

Beberapa harga komoditas bahan kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Jelang puasa dan lebaran ini, para pedagang di pasar-pasar tradisional menaikkan harga barangnya. Pemerintah diimbau rajin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional untuk mengontrol harga. Peraturan Presiden (Perpres) pun menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatur harga.

Komisi VI DPR RI, Kamis (11/6), melakukan sidak ke dua pasar berbeda di Jakarta, yaitu pasar Grogol di Jakarta Barat dan pasar Tebet di Jakarta Selatan. Banyak temuan yang didapat tim Komisi VI. Dari mulai fenomena naiknya harga komoditas, beredarnya makanan kemasan tanpa label, hingga Perpres yang harus segera diterbitkan pemerintah, semuanya menjadi

perbincangan menarik di pasar tradisional.

Tim Komisi VI yang berkunjung ke Tebet dipimpin Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir dan wakilnya Heri Gunawan. Anggota lainnya yang terlihat ikut sidak adalah Tina Nur Alam, Endang Srikarti Handayani, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Ihsan Yunus, dan Khilmi. Sementara yang sidak ke pasar Grogol dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana dan didampingi dua anggota lainnya Bambang Haryo Soekartono dan Dwie Aroem Hadiatie.

Harga tempe dan daging masih relatif stabil. Sementara harga beras, kacang tanah, kelapa, terigu, dan telur ayam mengalami kenaikan bervariasi. Kenyataan ini membuat konsumen menahan diri untuk ber-

belanja atau setidaknya mengurangi pembelian bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional. Penimbunan pun rentan terjadi di masa-masa puncak, yaitu jelang lebaran. Untuk itu, Komisi VI DPR mengimbau pemerintah segera mengeluarkan Perpres sebagai turunan dari UU Perdagangan.

Menurut Heri Gunawan (F-Gerindra), Perpres tersebut penting diterbitkan pemerintah, karena merupakan amanat Pasal 25 dan 29 UU No.7/2014 tentang Perdagangan. Perpres tersebut nantinya berisikan kriteria barang apa saja yang masuk kategori bahan pokok dan penting. Selain itu, Perpres juga mengatur batasan volume dan waktu penyimpanan barang, agar tak terjadi aksi penimbunan. Selama Perpres itu belum diterbitkan, tak ada sanksi hukum yang bisa menjerat para



penimbun.

Dalam kunjungannya ke pasar tradisional, Tim Komisi VI juga menemukan banyak produk makanan kemasan yang dijual tanpa label. Padahal, label tersebut penting untuk informasi kandungan dan waktu kadaluarsa. Konsumen harus dilindungi dari bahaya makanan yang tidak layak konsumsi.

Tina Nur Alam mengimbau pemerintah untuk rajin sidak ke pasar. Tujuannya, selain bisa mengontrol harga juga untuk merazia makanan tanpa label yang jelas.

Sementara Endang Srikarti mengimbau dinas terkait melakukan pembinaan kepada para produsen dan pedagang makanan soal pentingnya

mencantumkan label kemasan. Membuat label itu tak dipungut biaya sama sekali. Dari hasil peninjauan ke dua pasar tradisional di Jakarta tersebut, jelas sekali bahwa pemerintah tak rajin turun ke lapangan untuk meninjau harga dan peredaran barang berbahaya.

(mh) foto: husen/parle/hr

DPR Gelar Pameran Batu Akik



Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon membuka Pameran Batu Akik

Demam batu akik telah menyuburkan usaha kecil menengah (UKM) di masyarakat. Batu akik memang telah menjadi fenomena menarik di Tanah Air. Di tengah lesunya perekonomian nasional, batu akik tetap hidup dan menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat.

Untuk menyambut fenomena menarik tersebut, DPR RI menggelar pameran batu akik di Gedung Nusantara,

Senin (8/6). Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, menyatakan, pameran ini untuk merespon apa yang menjadi fenomena dan kegemaran masyarakat. "Ini jadi kesenangan tersendiri di tengah ekonomi yang lesu dan PSSI yang kena sanksi. Hanya batu akik yang tetap hidup," ujar Fadli.

Indonesia, kata Fadli, sangat kaya dengan khasanah batu akik. Karenanya, Indonesia menjadi nomor satu

di dunia yang memiliki kekayaan batu akik. Hadir dalam pembukaan pameran tersebut Ketua DPR RI Setya Novanto, Anggota Komisi VI DPR Endang Srikarti Handayani, dan Sekjen DPR Winantuningtyastiti. Novanto mengunting pita di arena pameran sebagai tanda dimulainya pameran ini hingga Jumat.

Sebelumnya, Sekjen DPR juga berharap Indonesia bisa menjadi pusat batu akik dunia. Ada banyak ragam batu akik yang dipamerkan. Fadli Zon sendiri memamerkan koleksi batu akiknya dari pelbagai daerah di Tanah Air. Selain itu yang ikut berpartisipasi dalam pameran ini adalah koleksi cincin dari Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron, Titi Soeharto Anggota Komisi IV, hingga mantan Bupati Garut Dicky Candra.

Tak ketinggalan koleksi kalung milik Sekjen DPR Winantuningtyastiti dan koleksi cincin milik Wakil Sekjen DPR Achmad Djuned juga ikut dipamerkan. Bahkan, para staf Setjen DPR ikut pula berpartisipasi memamerkan koleksinya. Dari batu bacan, safir, blue kalsedon, spiritus batu raja, akik sulaiman, pancawarna, kalimaya, merah siam, dan lain-lain ada di pameran ini. dan yang menjadi pusat perhatian pengunjung adalah koleksi batu akik terbesar di dunia milik Fadli Zon seberat 70 kg.

(mh)/foto:andri/parle/iw.

KAI Mengadu Lagi ke DPR

Kongres Advokat Indonesia (KAI) kembali mengadukan masalahnya ke Pimpinan DPR RI. Masalah yang selama ini membelit KAI adalah tidak diakuinya KAI sebagai wadah organisasi advokat oleh Mahkamah Agung (MA), sehingga tidak bisa beracara di pengadilan.

Delegasi KAI yang dipimpin Indra Sahnun Lubis sebagai Presiden DPP KAI diterima oleh Pimpinan DPR yang terdiri dari Ketua DPR Setya Novanto dan dua wakilnya, Fadli Zon serta Agus Hermanto, Senin (8/6). Indra menyatakan, sela-

ma ini MA telah melanggar hukum dengan tidak menerima sumpah profesi advokat yang tergabung dalam KAI. MA hanya mengakui Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai wadah tunggal advokat.

Selain ke DPR, KAI juga telah mengadu ke Komnas HAM, MPR, dan Komisi Yudisial untuk mengatasi masalahnya. KAI juga pernah mengadukan masalah ini ke DPR periode lalu. Hanya saja, kata Indra, hingga kini belum ada penyelesaian konkrit. Ada 30 ribu lebih advokat yang tergabung dalam



Pimpinan DPR RI menerima Delegasi Kongres Advokat Indonesia

KAI, tidak bisa mendampingi masyarakat dalam beracara di pengadilan.

Sumber masalah yang dihadapi KAI adalah SK Ketua MA No.089/2010 yang menyatakan bahwa calon advokat yang bisa disumpah di Pengadilan Tinggi adalah mereka yang tergabung dalam PERADI. Sumpah calon advokat dari KAI tidak diterima. Medengar hal tersebut Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang memimpin pertemuan mengatakan, segera akan mempertemukan KAI dengan MA dalam rapat konsultasi.

Menurut Fadli, selama edaran MA tersebut belum ditarik, masalah masih terus membelit tubuh KAI. Dengan mengagendakan rapat konsultasi, diharapkan ada penyelesaian konkrit, sehingga tak ada lagi advokat dari KAI yang tidak bisa beracara di pengadilan. (mh)/foto:andri/parle/iw.

Target Ekonomi Tak Tercapai Akan Dihadapkan Situasi Dadakan



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso dan Anggota Komisi III Nasir Jamil dan Sekjen DPR RI dalam Press Gathering

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan, ke depan ini pemerintah akan menghadapi masalah yang terkait dengan kepentingan masyarakat terutama bidang ekonomi. Pemerintah kelihatan begitu optimistik, tetapi kenyataannya indikator-indikator yang ada berbicara lain.

Berbicara dalam forum *Press Gathering*

ing Koordinatoriat Wartawan DPR yang bertema “Membangun Kebersamaan Dengan *Check and Balances* Antara Pers dan DPR di Yogyakarta, Jumat (5/6) lalu, Pimpinan DPR dari Fraksi Gerindra ini menegaskan, yang kita khawatirkan kalau target-target pemerintah ini tidak tercapai maka bisa muncul situasi dadakan.

Beberapa target itu diantaranya target inflasi, target pertumbuhan, kemudian pendapatan negara termasuk pajak. Apalagi lanjut dia, nilai rupiah yang masih terus melemah bahkan ada kecenderungan rupiah menembus 15 ribu di akhir tahun. “Sementara itu Presiden hingga kini masih sangat optimis, mudah-mudahan optimis ini ada benarnya,” tukas Fadli.

Kendati demikian, Pimpinan Dewan Koordinator Polkam ini mengharapkan Presiden hendaknya lebih sibuk memikirkan masalah-masalah ke depan. “Jangan sibuk bagi-bagi kartu. Kalau bagi-bagi kartu itu tugas Ketua RT. Kasihan ketua RT kalau tugasnya diambil alih oleh Presiden,” ujarnya dengan menambahkan, kita berharap ke depan pemerintah dan DPR saling introspeksi, DPR juga masih banyak kelemahan dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Tetapi rakyat mengharapkan peran pemerintah yang lebih besar khususnya dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

(mp)/foto:andri/parle/iw.

Perlu Penyesuaian Pola Baru Penyusunan UU

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui terkait masalah kinerja memang yang paling disorot masalah legislasi. Masalah legislasi ini masyarakat tidak

terlalu paham bahwa dalam proses pembuatan UU itu tidak bisa hanya dilakukan DPR tetapi juga peran pemerintah.

Hal itu dikatakannya pada acara *Press Gathering* wartawan DPR di Yogyakarta, Jumat (5/6) pekan lalu. Hadir pula dalam acara ini Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso, anggota Komisi III Nasir Djamil, Sekjen DPR Winantuningtyastiti, Deputi Perundang-undangan Johnson Rajagukguk dan beberapa pejabat Setjen DPR diikuti 112

wartawan yang tergabung dalam Koordinatoriat wartawan parlemen.

Menurut Pimpinan Dewan Koordinator Politik dan Keamanan ini, dari 37 target prolegnas, baru dua yang selesai. Dari jumlah 37 RUU itu, 26 RUU merupakan usulan DPR, 10 dari pemerintah dan 1 dari DPD. Dari pemerintah baru satu yang masuk, RUU Paten dan dari DPR juga masih dalam proses penyusunan belum masuk pada pembahasan. “Kita targetkan pembahasan menjelang akhir masa sidang ini sudah bisa dimulai,” tegasnya.

Politisi Gerindra ini mengakui kendala pembahasan RUU ini karena *startnya* terhambat oleh adanya *adjustment*–penyesuaian pola pembuatan RUU. Semula dilakukan Baleg kemudian sekarang diserahkan betul-betul ke komisi-komisi, sementara banyak anggota baru yang tidak terbiasa menyusun UU. “Harus diakui perlu ada *adjustment* terhadap pola baru ini, kemudian dilanjutkan harmonisasi dan sinkronisasi di Baleg. *Adjustment* terhadap UU baru ini sangat penting,” tegasnya lagi.

Di bagian lain, Fadli mengajak kawan-kawan pers bekerja dengan DPR terutama bidang pengawasan. Peran pers sebagai pilar keempat demokrasi dinilai sangat penting, Karena tanpa adanya media, suara rakyat tak mungkin terdengar. Suara DPR tak mungkin terdengar, jadi fungsi-fungsi DPR baik pengawasan, legislasi, anggaran, dan fungsi tambahan sesuai MD3 misalnya representasi dan peran diplomasi, pasti tidak akan bunyi di masyarakat. “Jadi kami sangat berterima kasih kepada rekan-rekan media, khususnya bersama-sama berkantor di DPR,” jelasnya.

Meski demikian, DPR ini menjadi sorotan publik, terutama kalau ada salah sedikit dari DPR pasti *blow-upnya* tinggi sekali. Hal ini sangat wajar karena harapan masyarakat begitu tinggi terhadap wakil-wakilnya. Tetapi diingat-



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat memberikan sambutan di Press Gathering

kan, kalau DPR dihajar terus, masa depan demokrasi juga terhambat, apalagi kalau ada usaha deparlemenisasi atau deparpolisasi. “Pasalnya memang tidak mungkin ada demokrasi tanpa parpol, tidak mungkin ada demokrasi tanpa ada parlemen,” ia menambahkan.

Akhirnya Pimpinan Dewan ini berharap, dengan *press gathering* ke depan ada semacam sinergi terutama program-program DPR dengan kalangan pers. “Jadi memang DPR harus ada perbaikan. Apalagi akan masuki usia 70 tahun pada 29 Agustus mendatang. Ini waktu yang sangat penting kita berharap kerja sama dan perlu dapat input dari media,” pungkas Fadli. (mp)/foto:naefuroji/parle/iw.

Polri Dukung Peningkatan Sistem Keamanan DPR



Kepala Badan Pemeliharaan Mabes Polri Komjen. Pol. Putut Eko Bayuseno

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dukung pentingnya peningkatan sistem keamanan di lingkungan DPR RI. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes

Polri Komjen. Pol. Putut Eko Bayuseno saat Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Legislasi DPR (Baleg) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/6)

“Kami sangat mendukung terhadap



Ketua Baleg DPR Sareh Wiyono

rencana pemberdayaan tenaga pengamanan dalam untuk peningkatan keamanan di lingkungan DPR. Pada prinsipnya Polri mendukung 100% peningkatan keamanan menuju kepada yang lebih baik,” kata Putut.

Dalam rapat yang membahas Peraturan DPR RI tentang Sistem Pengamanan dipimpin Ketua Baleg Sareh Wi-

yono tersebut, Putut menyatakan bahwa sistem pengamanan di DPR perlu disempurnakan. Salah satu solusinya yaitu dengan melakukan seleksi ulang terhadap tenaga pengamanan dalam (pamdal) yang ada saat itu untuk kemudian diberikan pendidikan dan pelatihan sebagaimana petugas keamanan. Karena menurutnya, berdasarkan informasi tidak semua tenaga pamdal yang ada telah mengikuti pendidikan

yang bersertifikat.

Ia juga menyarankan pentingnya kesadaran dan pengertian dari semua yang melakukan aktivitas di Gedung Dewan termasuk Anggota Dewan sendiri. Menurutnya, perlu dibuat suatu peraturan yang benar-benar ditaati oleh semua penghuni Gedung Rakyat ini.

Terkait polisi parlemen, ia menegaskan, perlu persiapan waktu yang

panjang dan hal ini dapat melibatkan Asrena Polri. Ia mengusulkan perlunya dibentuk Tim Kecil antara DPR dan Polri untuk melakukan survei tentang pengamanan.

“Saat ini yang diperlukan adalah penguatan dan optimalisasi sistem keamanan yang ada, sistem keamanan yang ada saat ini masih kurang,” ujar Putut. (sc) Foto: Naefuroji/parle/od

Pemerintah Diminta Kaji Penggabungan Antara, RRI dan TVRI



Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq sedang berdialog dengan Menkominfo

Komisi I DPR RI meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika mengkaji kemungkinan penggabungan tiga institusi negara yang bergerak di bidang pemberitaan yaitu Kantor Berita Antara, RRI, dan TVRI. Pilihan ini dinilai perlu menjadi pertimbangan di tengah konvergensi media yang semakin menguat.

“Kita mencermati tren yang terus berkembang adalah konvergensi atau pengintegrasian media. Mungkin tidak

fungsi Antara yang ada dimerges dengan RRI dan TVRI, kita minta pandangan awal dari Pak Menteri,” kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq dalam rapat dengan Menkominfo serta Direksi Antara di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6).

Bicara pada kesempatan yang sama anggota Komisi I dari Fraksi Partai Hanura M. Arief Suditomo mengkritisi kinerja Kantor Berita Antara yang menurutnya tidak kunjung membaik. Ia meminta kantor berita yang berdiri sejak tahun 1937 mempelajari bagaimana kantor berita seperti Reuters dari Inggris atau AP dari Amerika Serikat bisa tetap eksis.

“Saya melihat Antara memproduksi banyak paket berita jadi yang kemudian tidak laku. Kalau melihat kantor berita di negara maju mereka itu memproduksi paket mentah yang kemudian dapat dimodifikasi oleh pelanggan mereka. Ini terkait dengan editorial media masing-masing,” tutur mantan presenter televisi ini.

Direktur Keuangan Antara Endang Sri Wahyuni memaparkan Kantor Berita Nasional Antara saat terus berupaya bangkit dari belitan masalah keuangan. Sejumlah keberhasilan berhasil ditorehkan seperti penurunan utang pajak pada tahun 2014, dari Rp35 miliar menjadi Rp18 miliar.

“Kami menyerahkan keputusan kepada pemerintah dan DPR apakah Antara akan digabungkan dengan TVRI dan RRI. Sejauh ini kita sudah membangun kerja sama B to B dengan TVRI dan RRI,” demikian Endang. (iky) Foto: Andri/parle/od

Komisi I Dukung KPI Kembangkan Rating TV

Komisi I DPR RI menilai positif upaya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengembangkan riset dan peringkat untuk setiap televisi di seluruh tanah air. Langkah ini diharapkan pada saatnya dapat menjadi rujukan sekaligus sebagai penyeimbang terhadap ketergantungan pada satu lembaga pemeringkat.

“Saya apresiasi pelaksanaan *rating* nasional KPI yang kita harap dapat mencuri perhatian TV swasta. PR dari KPI adalah harus mampu menyaingi Nielsen yang sekarang menjadi acuan TV swasta. Saya percaya KPI punya acuan yang berbeda,” kata anggota Komisi I Irine Yusiana Roba Putri dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung

DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/15).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini meyakini dengan dukungan Ikatan Sarjana Komunikasi di sejumlah daerah di tanah air upaya ini akan membuahkan hasil bagi peningkatan kualitas siaran televisi. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Maluku ini mengaku prihatin dengan produk siaran televisi yang saat ini terjebak panduan *rating* yang salah.

Bicara pada kesempatan yang sama anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Elnino M. Husein Mohi juga me-



Suasana rapat Komisi I dengan Komisi Penyiaran Indonesia

nyampaikan dukungan yang sama. Ia memimpai Pimpinan KPI mengajukan anggaran untuk mendapat dukungan dari dewan.

“Berapa dana yang dibutuhkan KPI untuk bisa memantau seluruh siaran TV dan media penyiaran yang ada di Indonesia. Bisa tidak KPI melakukan itu, sampaikan rancangannya kepada DPR, kita siap mendukung,” tandas wakil rakyat yang mengaku sudah

lama tidak lagi menonton siaran televisi nasional karena prihatin dengan muatan programnya.

Menjawab hal ini Ketua KPI Judharsawan mengatakan pelaksanaan survei dan penetapan peringkat ini tidak hanya bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Komunikasi tetapi juga didukung sembilan universitas negeri di Indonesia. Upaya ini sebenarnya akan diperluas tetapi masih terkendala

anggaran.

“Dari awal kita ingin mengembangkan riset ini lebih luas tapi karena anggaran 2015 tidak mencukupi maka kami perkirakan pada tahun depan akan lebih luas. Kami harap ini bisa menjadi alternatif rating dan kita posisikan hasil riset ini menjadi panduan penyiaran di tanah air,” papar dia. (iky)

Foto: Andri/parle/od

Kemenristek dan Dikti Dituntut Kembangkan Knowledge Berbasis Desa

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP Mercy Criesty menilai titik pertumbuhan di suatu negara sekarang ini berbasis desa. Oleh karena itu, Kementerian Riset dan Dikti harus mampu mengembangkan studi lapangan (*field study*) yang mampu meningkatkan kemampuan dan kapasitas di pedesaan.

“Titik tumbuh pertumbuhan sekarang ini berbasis desa namun kita tidak punya *field study* seperti halnya pemerintahan Australia banyak menghimpun *knowledge study* berbasis desa,” jelas saat Raker dengan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha, di Gedung Nusantara I, Rabu, (10/6).

Dia menambahkan, perlu disusun semacam *knowledge study* sebagai langkah dekonstruksi atau sebuah lompatan besar yang bisa dimulai dari Kemenristek.

“Malaysia saja sudah mulai merajut membangun pengetahuan baru, mereka bahkan sudah memiliki skenario *planning* yang luar biasa dan diterapkan sampai 2050,” ujarnya.

Menurutnya, pada tahun 2025 diperkirakan energi di Indonesia akan habis dan nantinya akan terjadi perang perebutan energi diakibatkan pertumbuhan penduduk yang semakin melonjak. “Ini hanya sebagai sumbangan pemikiran saja, jadi perlu langkah atau visi kedepannya,” jelasnya.



Anggota Komisi VII DPR Mercy Criesty

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKB Syaikhul Islam mengatakan, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi harus segera melakukan inventarisasi inovasi teknologi asli anak negeri. “Kita akan mensupport dari sisi anggaran atau dana optimalisasi yang ada di Kementerian,” paparnya. (Si)

Foto: Naefuroji/parle/od

Komisi IV Desak Pemerintah Segera Bentuk Lembaga Ketahanan Pangan Nasional



Anggota Komisi IV DPR Ichsan Firdaus

Komisi IV mendesak Pemerintah agar melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, untuk segera membentuk Lembaga Ketahanan Pangan Nasional yang berperan salah satunya sebagai *buffer stock*.

“Presiden Harus segera menjalankan amanah UU No.18 Tahun 2012, sehingga mimpi presiden bahwa produksi beras nasional terkendali dan tidak terjadi fluktuasi terlalu jauh terhadap kenaikan harga beras, dengan perubahan sistem di dalam kelembagaan institusi pangan nasional,” kata

Anggota Komisi IV Ichsan Firdaus dari Fraksi Partai Golkar, disela-sela Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Dirut Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), di Gedung Nusantara DPR RI, Rabu (10/6).

Menurut Ichsan, problem Bulog saat ini tidak mampu bersaing dalam menyerap beras dari petani, karena harus berkompetisi dengan sektor swasta. Oleh karena itu, sistem Perum Bulog harus diubah, artinya kelembagaan bulog tidak lagi berbentuk Perum tetapi menjadi Lembaga Ketahanan Pangan Nasional, yang diamanatkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaga tersebut diamanatkan bahwa harus dibentuk lembaga ketahanan pangan nasional yang berperan salah satunya adalah sebagai *buffer stock*.

“Bulog harus diberikan kewenangan yang luas, tidak seperti yang telah dilakukan oleh perum bulog hari ini. Jadi persoalannya itu bukan pergantian direksinya, selama sistemnya seperti ini hasilnya sama saja,” katanya.

Selain itu, sempitnya ruang gerak Bulog di tingkat bawah juga yang membuat Bulog tidak berdaya. Walaupun HPP sudah dinaikkan Bulog tetap belum bisa menyerap beras dari petani secara maksimal. Artinya persoalannya bukan di perum Bulog tetapi didalam sistem lembaga ketahanan pangan nasional itu. Hari ini Bulog tidak mampu, regulasinya terlalu sempit bagi Bulog untuk berperan sebagai lembaga penyangga pangan nasional.

“Harus segera diubah Perum Bulog sebagai Perusahaan BUMN, tapi Bulog sebagai lembaga ketahanan pangan nasional. Harus jelas kepresnya harus ada, *roadmap*nya, dan strategi operasional di lapangan.” tegasnya politisi Dapil Jawa Barat V. (agung) *foto:ray/parle/iw*

Komisi VII DPR Dukung Pembangunan PLTN

Komisi VII DPR mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) guna meningkatkan ketahanan dan kemandirian di sektor energi nasional.

Hal itu mengemuka saat Komisi VII DPR mengadakan Raker dengan Menteri Riset dan Dikti, Muhammad Nasir dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha di Gedung Nusantara I, Rabu, (10/6).

“Perlu disosialisasikan kepada masyarakat kita terkait pembangunan nuk-

lir, padahal kita ketahui, Indonesia sudah memiliki BATAN,” ujar anggota Komisi VII DPR Lucky Hakim dari Fraksi PAN.

Menurutnya, banyak paradigma negatif yang beredar terkait bahaya nuklir. Karena itu, perlu adanya sosialisasi bersama terkait energi nuklir yang bersih dan aman.

“Saat ini Indonesia memang sedang krisis energi, ini mengapa setiap gagasan pembangunan energi nuklir banyak sekali LSM yang menentanginya,” jelasnya.



Anggota Komisi VII Lucky Hakim



Dia menegaskan, Pemerintah harus segera membangun PLTN. sehingga Indonesia dapat meningkatkan kemandiriannya di sektor energi. “Vietnam saja sudah mulai membangun pembangkit nuklir masa kita belum juga,” tambahnya.

Hal senada disampaikan oleh Andri-

yanto Johan Syah (F-PAN) dari Dapil Jateng X, dia mengatakan, Komisi VII DPR mendukung penuh langkah pemerintah untuk membangun PLTN. “Kedepan kita akan mengalami krisis energi jadi kita butuh terobosan energi yang murah, bersih dan aman,” jelasnya.

Dia menambahkan, Komisi VII DPR memberikan tantangan besar dalam era Jokowi sekarang ini agar menggolkan nuklir untuk kemandirian energi. “Kita memberikan tantangan dalam era Jokowi agar menyusun *blue print* realistis terkait energi nuklir,” paparnya. (sugeng) Foto: Naefuroji/parle/od

Pemerintah Diminta Ubah Aturan Yang Hambat Regulasi Rumah Rakyat

Soal Perumahan rakyat, Pemerintah diminta merubah aturan yang menghambat rakyat untuk memiliki rumah murah. Pasalnya, sampai saat ini harga rumah semakin tidak terjangkau oleh mayoritas berpendapatan rendah.

“Regulasi perumahan harus diubah otomatis dengan aturan yang memihak rakyat kecil, karena itu perlu dikomunikasikan dengan Menteri Keuangan, jangan sampai rakyat sulit mendapat rumah, karena itu tidak heran Rusunawa banyak dimiliki oleh orang yang berada,” jelas anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Rendy Lamadjido saat Raker dengan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, di Gedung Nusantara, Rabu, (10/6).

Pada kesempatan itu, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Budi Yuwono mengatakan, pemerintah harus



Anggota Komisi V DPR Rendy Lamadjido

lebih memberdayakan peran daerah dalam menjalankan program PU maupun Perumahan Rakyat. Misalnya saja untuk Balai di PU maupun Perumahan rakyat tidak perlu ada di semua provinsi yang maju.

Sementara itu, lanjutnya, untuk program PU dan perumahan rakyat kerap tidak sinkron dan saling mendukung satu sama lainnya. “Misalnya saja usuan penambahan anggaran Rp. 21 Triliun pada tahun 2016 ini tidak sinkron dengan usulan PU sebelumnya,” paparnya.

Seperti diketahui, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hanya menikmati 20 persen rusun sewa subsidi yang dibangun pemerintah. Dengan kata lain, 80 persennya dikuasai orang yang tak berhak menyewa. (Si) foto:rizka/parle/iw

Genjot Infrastruktur, Pemerintah Harus Koordinasi dengan Daerah

Komisi V DPR meminta Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono melakukan sinergi antara pusat dan daerah terkait perubahan tata wilayah sehingga dapat mengantisipasi dampak pembangunan infrastruktur kedepannya.

“Perubahan tata wilayah harus sinergi, DPR ingin adanya kesamaan antara pusat dan daerah, keinginan cepat membangun infrastruktur juga harus direspon bersama,” ujar Anggota DPR dari Fraksi PKS Abdul Hakim saat Raker dengan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Fahri Djemi

Francis, di Gedung Nusantara, Rabu, (10/6).

Menurutnya, rencana pembangunan jalan tol harus diantisipasi dampak negatifnya. Artinya jangan sampai mengganggu target pemerintah dalam meningkatkan swasembada pangan. “Jadi harus terpadu dan perlu semangat suhu antara pusat dan kota,” paparnya.

Dia menambahkan, yang dapat menggenjot perekonomian yang menurun saat ini yaitu pembangunan infrastruktur yang masif. “Jadi perlu adanya resolusi pembangunan jalan tol. Jika perlu duduk bersama untuk



Anggota Komisi V DPR Abdul Hakim

menyelesaikan kendala dalam mendorong pembangunan infrastruktur,” jelasnya

Pembangunan jalan, paparnya, harus semakin terintegrasi dengan sarana transportasi lainnya seperti kereta api maupun transportasi laut. “Jangan sampai darat semakin tertekan karena over kapasitas, perlu jaringan yang terintegrasi antara laut, udara maupun kereta api,” paparnya.

Dirinya mendukung peningkatan anggaran Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebesar Rp. 178 triliun untuk pembangunan infrastruktur. “Adanya keinginan untuk meningkatkan kemantapan jalan darat mencapai 89 persen tentunya juga akan berimplikasi peningkatan beban jalan Provinsi dan Kota,” jelasnya.

Hakim melanjutkan, akibat tingginya intensitas pembangunan jalan akan

menambah beban dan tingkat kerusakan Jalan di daerah. “Dana alokasi khusus tidak bisa mengcovernya. Segera susun konsep pembangunan jalan yang terintegrasi. Mari ubah sistem regulasinya sistem kebijakan jalan dengan mengintegrasikan dengan jalan yang ada,” tegasnya. (Si) *foto:rizka/parle/ry*

Komisi IV Bentuk Panja Perambanan dan Perusakan Kawasan Hutan



Anggota Komisi IV DPR Ono Surono

Komisi IV DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Perambanan dan Perusakan Kawasan Hutan. Pembentukan Panja ini sebagai upaya merespon banyaknya kasus penyerobotan kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Menurut anggota Komisi IV Ono Surono dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ada banyak modus

penyerobotan hutan lindung dan hutan konservasi menjadi perkebunan sawit dan berbagai macamnya, dan ini sudah berlangsung sudah lama. Ini menjadi modus secara resmi diajukan untuk diberikan ijin alih fungsi.

“Komisi IV sepakat membentuk Panja untuk meneliti secara detail terutama di 4 Provinsi, yaitu Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara,” kata Ono Surono, usai Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Rabu (10/6), di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.

Politisi Dapil Jawa Barat VIII ini mengatakan perlu mengetahui secara detail proses sehingga terjadinya penyerobotan lahan hutan tersebut, karena ini tentunya melanggar hukum. Dia tidak ingin Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terjebak dengan modus-modus tadi.

“Kita ingin meneliti kalau ini ada pelanggaran peraturan-perundang-undangan dan terdapat unsur pidana maupun menimbulkan kerugian negara, Pemerintah dan Penegak Hukum harus tegas menindak itu,” tegasnya.

Selanjutnya, Ono mengungkapkan, ada beberapa kelemahan dari beberapa kasus yang muncul, misalnya terkait suap dengan kepala daerah yang merupakan salah satu indikasi lemahnya aturan perundang-undangan. Atau peraturan perundang-undangannya tidak cukup untuk bisa mewakili semua kepentingan tapi pada tataran pelaksanaannya ini selalu dimanfaatkan oleh oknum-oknum. (as) *foto:ray/parle/iw*

Kinerja Kemenkumham Menurun

Belum genap satu tahun kinerja Kementerian Hukum dan HAM dinilai menurun. Akibat penurunan ini sampai-sampai Menteri Keuangan mengurangi anggarannya. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaedi Mahesa saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di ruang rapat Komisi III DPR Rabu, (10/6) siang.

Lebih lanjut Desmond mempertanyakan apakah penu-

runan kinerja itu karena penyerapan anggaran kecil atau kinerja Kementerian Hukum dan HAM menurun, sehingga rencana anggaran tahun 2016 pun diturunkan oleh Menteri Keuangan.

Menurut politisi Gerindra ini, pada tahun anggaran 2015 Kemenkumham mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.11.178.587.701.000,- (sebelas trilyun seratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh



Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaedi Mahesa

ratus satu ribu rupiah), sementara pada tahun 2016 Kementerian Hukum dan Ham mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.10.346.011.304.000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp 1 T lebih.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengakui, bahwa belakangan ini memang banyak kasus-kasus yang terekspos media massa terkait kinerja masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba. Dia beserta jajarannya berkomitmen untuk

melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan Kemenkum HAM.

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pembinaan Napi/Tahanan terutama dengan adanya fenomena pengendalian peredaran gelap Narkoba di dalam Lapas, bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan penindakan terhadap pegawai yang terlibat peredaran gelap narkoba.

Mulai hukuman disiplin tingkat sedang, hingga hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Disisi lain dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan kepada warga binaan masyarakat masih terdapat kekurangan petugas pengamanan pada Lapas/Rutan.

Dijelaskan Laoly, jumlah petugas keamanan lapas idealnya adalah 27.141 orang, sedangkan kondisi saat ini sejumlah 14.456 orang, sehingga masih terdapat kekurangan petugas pengamanan yang sangat signifikan.

“Kami menyadari realisasi anggaran tersebut masih kecil, karena masih terdapat mekanisme revisi yang sedang dalam proses penyelesaian sebagai akibat adanya penghematan perjalanan dinas dan kegiatan konsinyering, serta proses pengadaan barang dan jasa yang belum final,” ungkap dia.

Meski demikian, Laoly meyakini sejauh ini seluruh output yang menjadi target Kementerian Hukum dan HAM dapat tercapai. Pihaknya senantiasa berupaya agar seluruh proses pencapaian kinerja di lingkungan Kementerannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. (spy). Foto: Andri/parle/od

Soal Calon Panglima TNI, DPR Hormati Pilihan Jokowi

Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Muzani mengajak semua pihak untuk menghormati pilihan Presiden Jokowi untuk mengajukan nama KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI. Walau tidak sesuai dengan tradisi pergiliran yang selama ini dibangunkan, namun pilihan itu sama sekali tidak melanggar ketentuan yang ada.

“Kita hormati karena ini adalah hak prerogatif presiden bahwa presiden tidak mengikuti tradisi yang sudah dibangun sejak Presiden Abdurrahman Wahid, iya tetapi tidak ada UU yang dilanggar dari penunjukan ini,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (10/6).

Lebih lanjut wakil rakyat dari daerah pemilihan Lampung I ini meyakini keluarga besar TNI terutama TNI AU akan dapat legowo menerima keputusan ini. “Saya kira ini adalah soal pengabdian kepada bangsa dan negara, sebagai prajurit sapta marga tentu harus selalu



Suasana rapat Komisi I DPR dengan Panglima TNI



siap dengan penugasan dan kondisi apapun,” tutur dia.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebut telah menerima surat dari Presiden Jokowi tentang pengusulan calon Panglima TNI kepada DPR. Berdasarkan UU ada waktu 20 hari bagi DPR untuk membahas usulan

tersebut.

Surat tersebut menurutnya tidak menjelaskan kenapa presiden mengusulkan hanya satu nama yaitu KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo. “Ini tren baru tentu DPR berharap presiden dalam menjelaskan alasan pemilihan ini,” ungkapnya. Baginya penjelasan diperlukan untuk menjaga situasi kondusif.

Sanksi FIFA Memang Dikehendaki Menpora

Anggota Komisi X DPR Jefirstson Riwu Kore menilai, sanksi FIFA yang dijatuhkan kepada Indonesia karena sikap keras kepala Menpora, sehingga berakibat merugikan sepak bola Indonesia. Selaku anggota Komisi X sangat kecewa dengan langkah Menpora yang tidak sama sekali mempertimbangkan usulan DPR.

“Karena itu Komisi X harus mengambil langkah tertentu kepada Menpora,” tegas Jefirstson menjawab Parle di Gedung DPR, Senayan baru-baru ini.

Politisi Partai Demokrat ini menduga, sanksi yang dijatuhkan FIFA kepada PSSI memang dikehendaki Menpora. Buktinya sejak awal raker dengan Menpora belum lama ini, kesimpulan raker mengindikasikan ke arah sanksi oleh organisasi sepak bola internasional tersebut.

Kesimpulan pertama, lanjut Jefirstson, mengapresiasi rencana pemerintah untuk pembinaan sepak bola yang lebih baik sehingga prestasi sepak bola Indonesia bagus. Kemudian kesimpulan kedua, dalam usaha pembinaan sepak bola itulah maka Komisi X berharap supaya pemerintah hati-hati agar tidak disanksi oleh FIFA.

Kesimpulan kedua ini ditolak dan tidak disetujui Menpora padahal merupakan signal agar pemerintah hati-hati.

Sampai saat itu rapatnya *dead lock* sebab menolak kata-kata sanksi itu. “Ini indikasi memang dari awal menghendaki ada sanksi FIFA,” tegas politisi asal Dapil NTT ini.

Ke depan, Komisi X kemungkinan akan menggulirkan hak interpelasi kepada Menpora. Secara pribadi, kata Kore, setuju digulirkan interpelasi untuk pemerintah. Meski demikian dirinya masih harus menyampaikan kepada Pimpinan fraksi dan juga loby kepada fraksi lain untuk menggulirkan interpelasi. “Saya lihat teman-teman fraksi lain setuju sebab berdampak kepada masyarakat luas. Saya optimis,” katanya.

Menanggapi mundurnya Presiden FIFA Sepp Blatter, Jeffri menyatakan tak ada dampak bagi persepakbolaan tanah air, sebab menyangkut masalah pribadi. Hanya saja dia juga mendesak mafia-mafia sepakbola Indonesia harus diberantas. Selama ini seolah-olah FIFA raja, tidak bisa disentuh. Dengan mundurnya Blatter diharapkan ada Pimpinan FIFA yang baru sehingga Indonesia juga mendapatkan *benefit* yang lebih banyak dari FIFA.

Saat ditanya bahwa langkah kontroversial Menpora itu untuk mereformasi PSSI, Jefirstson mengatakan dirinya tidak melihat *road map* yang bagus dari

Pasal 13 UU no.34 tahun 2004 menjelaskan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala angkatan. Hanya saja tidak ada pengaturan secara eksplisit bahwa jabatan itu harus bergiliran pada tiga mata yang ada yaitu AD, AL dan AU. (iky) Foto: Andri/parle/od



Anggota Komisi X DPR Jefirstson Riwu Kore

Menpora. Dia menduga sanksi FIFA dijatuhkan karena masalah-masalah individu yang dibawa ke ranah politik.

“Saya yakin memang ada abuse of power Menpora untuk membekukan PSSI. Namun Menpora tidak mempertimbangkan efeknya. Bayangkan, bagaimana para pemain bisa hidup dengan anak-anaknya, keluarganya, *official* dan orang-orang yang hidup dari sepak bola, pengurus. Dan terpenting hiburan masyarakat,” katanya.

Kalau ada orang diduga korupsi, orangnya ditangkap bukan PSSI yang dibekukan. Terkait Tim Transisi, dengan tegas Jeffry menyatakan menolak. “Saya usulkan Tim Transisi dibubarkan saja. Itu salah langkah dari Menpora. Yang tidak berprestasi bukan hanya PSSI, cabang olah raga lain juga ada yang minim prestasi,” kata Jeffri menambahkan. (mp)/foto:jaka/parle/iw.

Udang Diserang Penyakit, Target Produksi Bisa Meleset

Wabah penyakit berupa kotoran putih (*white feces disease*) menyerang sentra-sentra budidaya udang di berbagai daerah. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus segera

bertindak. Target produksi udang sebanyak 789.900 ton yang dicanangkan KKP terancam meleset.

Demikian penegasan Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto (dapil Sumbar I)

dalam rilisnya yang diterima Parlemen, Selasa (9/6). Hermanto mengaku banyak menerima laporan dari para petambak udang di daerah. Wabah ini sebenarnya sudah menyerang sejak



Oktober 2014. Namun, belum ada penanggulangan secara masif soal ini.

“Untuk dapat mencapai target produksi tersebut, KKP jangan hanya melihat sisi positifnya saja berupa potensi dan teknologi yang telah dimiliki, tetapi harus juga mencermati dan mengatasi faktor-faktor negatif, seperti kenaikan harga pakan, turunnya harga udang, dan serangan wabah penyakit seperti sekarang ini,” paparnya.

Shrimp Club Indonesia melaporkan, sejak Oktober 2014 lalu, wabah penyakit udang tersebut masih terus menyerang. Kini, penyakit tersebut sudah mewabah di Medan, seluruh pantai utara dan selatan Jawa, hingga ke Sumbawa. Serangan penyakit ini mengakibatkan pertumbuhan udang lamban sekalipun nafsu makannya normal. Bahkan, tubuh udang bisa menyusut.

Penyakit ini, lanjut politisi PKS itu, menyerang udang sejak berumur 16 hari hingga 80 hari menjelang panen. Petambak udang Bumi Dipasena Lampung dilaporkan mengalami kerugian karena mengecilnya ukuran udang dari yang seharusnya 50 ekor per kilogram (*size 50*) menjadi hanya 90 ekor per kilogram (*size 90*).

“Kalau dihitung sejak Oktober 2014,



Anggota Komisi IV DPR Hermanto saat menjabat tangan dengan Menteri Pertanian

maka serangan penyakit itu sudah memasuki bulan ke-8. Skala serangan penyakit pun sudah cukup luas, dari Medan sampai Sumbawa. Para petambak juga sudah mengalami kerugian,” tutur Hermanto. Mestinya KKP sudah melakukan upaya-upaya penanggulangan yang konkrit.

“Jika sampai saat ini belum melakukan apapun, maka tunggu apa lagi?” tanyanya. “Segera lakukan upaya-upaya penanggulangan di daerah-daerah yang sudah terkena wabah dan cegah wabah tersebut agar tidak meluas ke daerah-daerah yang belum terjangkau,” pungkasnya. (mh) foto: rizka/parle/od

Kinerja Kemenperin Masih Lemah



Suasana rapat Komisi VI DPR dengan Menteri Koperasi

Kinerja Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dinilai masih lemah dalam menumbuhkan industri nasional. Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) juga belum optimal. Apalagi, impor bahan baku industri masih sangat tinggi, sehingga menyulitkan pertumbuhan industri nasional.

Demikian penilaian Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah (dapil Jateng VIII) di sela-sela rapat kerja dengan Menteri Perindustrian Saleh Husin, Selasa sore (9/6). “Saya lihat dari laporan yang disampaikan sangat kurang. Baru sekitar 15 persen yang sudah dikerjakan Kemenperin. Artinya masih terlampau jauh dan berat. Ini tentu harus di-

genjot agar perindustrian benar-benar melakukan kinerja secara lebih baik dan maksimal,” tandas Mukaromah.

Di daerah-daerah banyak sekali sentra industri kecil menengah (IKM) yang perlu diberdayakan. Ini menjadi tanggungjawab Kemenperin, agar IKM tersebut menghasilkan produk unggulan. Mukaromah mencontohkan, di dapilnya ada sentra industri gula semut (*palm sugar*) yang mutunya sangat baik dibanding produk-produk impor.

Ini mungkin luput dari perhatian Kemenperin. Bila dikelola dengan baik, gula semut tersebut bisa terus ditingkatkan ekspornya. “Di dapil saya banyak produk gula semut. Itu kualitasnya sudah ekspor dan tertinggi dari beberapa negara yang mempunyai produk unggulan gula semut. Nah, sekarang bagaimana kita mengoptimalkan produk tersebut untuk ditingkatkan ekspornya,” ungkap politisi PKB ini. (mh) Foto: Naefuroji/parle/od

Industri Nasional Masih Kesulitan Produksi



Anggota Komisi VI DPR Lili Asjudiredja

Tingginya angka impor bahan baku industri dan melemahnya nilai tukar rupiah masih meyalutkan industri nasional untuk tumbuh. Produksi industri lokal belum beranjak naik di tengah lesunya perekonomian nasional.

Demikian diutarakan Anggota Komisi VI DPR RI Lili Asjudiredja (dapil Jabar II) saat rapat kerja dengan Menteri Perindustrian Saleh Husin, Selasa (9/6). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir itu, banyak mengkritik kinerja Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Menurut Lili, selama ini impor bahan baku industri masih sangat tinggi, mencapai 76 persen.

Sementara impor barang-barang produksinya, lanjut politisi Golkar tersebut, masih mencapai 17-16 persen. "Industri kita mengalami kesulitan dengan angka impor yang tinggi ditambah nilai rupiah yang sudah mencapai Rp13.400," ungkap Lili lagi. Untuk itu, industri bahan baku di dalam negeri perlu ditambah.

Seperti diketahui, Kemenperin sendiri merilis informasi bahwa 64 persen industri di Indonesia sangat bergantung pada bahan baku impor. Fakta ini tentu tidak menguntungkan, karena harganya akan bergantung pada fluktuasi kurs rupiah terhadap dollar Amerika. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iv.

Baleg DPR: RUU Penjaminan untuk Perkuat UMKM

Kehadiran RUU Penjaminan untuk memperkuat usaha mikro kecil dan menengah koperasi (UMKM), yang selama ini kurang mendapat perhatian pemerintah. Padahal, salah satu usaha kecil menengah yang terbukti bertahan di saat negara krisis ekonomi tahun 1998 silam adalah UMKM. Karena itu, kelangsungan UMKM harus diperkuat melalui UU Penjaminan ini.

Hal itu disampaikan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar Muhammad Misbakhun pada acara diskusi forum legislasi bertajuk 'RUU Penjaminan' bersama pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/6).

"Kita selama ini melihat ada kepentingan besar dalam sistem perekonomian bangsa ini dan itu ada di UMKM sebagai tulang-punggung perekonomian nasional dan terbukti bertahan sejak krisis 1998. Karena itu, nantinya pemberi kredit, yaitu perbankan bisa memberikan penjaminan itu melalui RUU Penjaminan ini," kata Misbakhun.

Menurut Misbakhun sebanyak 58 juta pemilik UKM menjadi tulang-



Anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun dan pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy

punggung perekonomian nasional, maka keperpihakan kepada rakyat kecil tersebut diantaranya harus didorong melalui RUU Penjaminan ini.

Sebab, dengan adanya RUU Penjaminan, kata Misbakhun akan ada skema

kelayakan, kurang layak, dan tidak layak bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan akses perbankan. "Saya berharap sistem penjaminan Indonesia bisa seperti Jepang dan Korea, yang ada garansinya," ujarnya.

Ia menambahkan, Baleg DPR kini sedang melakukan harmonisasi RUU Penjaminan tersebut, selanjutnya akan dibawa ke paripurna DPR RI dan kemudian diserahkan kepada Presiden RI untuk mendapatkan Amanat Presiden (Ampres) dan, lalu paripurna DPR RI bisa mengesahkan menjadi UU. “Sebelum Ramadhan 1436 H yang akan jatuh pada 18 Juni 2015 ini, DPR akan mengirim kepada Presiden RI untuk mendapatkan Ampres,” tambahnya.

Di tempat yang sama, pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menilai secara filosofis RUU Penjaminan ini sudah tepat untuk melindungi rakyat kecil dalam berusaha. Namun, bukan terbatas pada pembiayaan untuk UMKM, tapi seharusnya juga untuk manajemen, pemasaran dan inovasi.

Di samping kata Noorsy, RUU ini juga bukan UU organik karena tidak diperintahkan oleh konstitusi. Dengan begitu, lanjut Noorsy, DPR juga salah

dalam mempelajari asas akuntabilitas, karena setiap tindakan yang terpercaya dan terukur itu harus bisa dipertanggungjawabkan.

“Jadi, RUU ini belum dalam kerangka ekonomi secara menyeluruh, maka jangan menjadikan UMKM sebagai korban. Jadikanlah UMKM itu seperti di Jepang dan Korea, yang diperhitungkan dalam perekonomian negara,”katanya. (nt/sc) Foto: naefuroji/parole



Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan

Industri Kecil Menengah (IKM) dari dunia pesantren perlu mendapat perhatian serius Kementerian Perindustrian (Kemenperin). IKM pesantren sangat banyak di Indonesia dan belum

IKM Pesantren Perlu Perhatian Serius

mendapat perhatian untuk segera dibantu kelangsungan industrinya.

Anggota Komisi VI DPR RI M. Nasim Khan (dapil Jatim III) menyampaikan hal tersebut di hadapan Menteri Perindustrian Saleh Husin saat rapat kerja dengan Komisi VI, Selasa (9/6). “Program IKM di pondok pesantren butuh perhatian pemerintah,” katanya. Seperti diketahui IKM berbasis pondok pesantren banyak memproduksi garmen. Untuk itu, bantuan alat-alat produksi sangat dibutuhkan, seperti mesin jahit dan juga permodalan.

Bantuan bagi IKM di pesantren-pesantren sangat penting untuk me-

numbuhkan kewirausahaan di kalangan santri. Di dapilnya sendiri, lanjut Nasim, banyak pesantren berdiri. Bila IKM-nya dikelola dan mendapat bantuan pemerintah tentu sangat membantu perkembangan ekonomi rakyat setempat.

“Kenapa tidak mencoba memasuki pondok pesantren. Negara kita ini luas. Hampir di setiap daerah pasti memiliki pesantren,” tandas politisi PKB tersebut. Dengan pemberdayaan IKM pesantren, tentu bisa menumbuhkan kecintaan pada produk lokal sekaligus mengendalikan tekanan produk impor. (mh)/foto: naefuroji/parole/iw.

Komisi VII DPR Dukung Menteri ESDM Berantas Mafia Migas

Komisi VII DPR mendukung langkah Menteri ESDM Sudirman Said yang ingin memberantas mafia migas.

“Jika ada mafia migas mari kita sama-sama memberantasnya, kami sebagai wakil rakyat tentu akan mendukung pemberantasan itu. Jika ada hal yang belum diperbaiki mari kita perbaiki,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi saat Raker dengan Menteri ESDM Sudirman Said, di Gedung Nusantara I, Selasa, (9/6).

Menurut Mulyadi, saat ini tim reformasi tata kelola migas yang dipegang oleh Faisal Basri seperti *head to head* dengan Pertamina. “Memang terkesan dirinya tidak tertarik membubarkan Petral yang jadi persoalan itu adalah Ron 88,” jelasnya.

Faisal Basri, selanjutnya, selalu mengungkapkan bahwa bang keladi dalam reformasi tata kelola migas yaitu kehadiran ron 88.

Seperti diketahui, Komite Reformasi telah berakhir pada 13 Mei 2015. Komite tersebut dibentuk Sudirman pada 16 November 2015. Selama masa kerja, Komite Reformasi telah



Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi

mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Pertama, penghapusan bensin RON 88 ke RON 92 dengan masa transisi dua tahun. Kedua, pengalihan fungsi pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah dari Pertamina Energy Trading Limited (Petral) ke Integrated Supply Chain (ISC) yang berada di bawah PT Pertamina (Persero) langsung.

Pada hari terakhir masa kerja, Tim Reformasi merekomendasikan enam rekomendasi yakni rekomendasi umum, pengelolaan penerimaan negara dari sektor migas, format tata kelola migas, sistem fiskal sektor hulu migas, perpanjangan kontrak migas, serta perizinan dan investasi. (sug-eng) Foto: Naefuroji/parle/od

Peningkatan SDM Diperlukan Dalam Kelola Dana Desa



Anggota Komisi V DPR Ridwan Bae

Program dana desa diharapkan dapat mengcover mayoritas desa yang ada di Indonesia. Selain itu, perlu adanya peningkatan SDM pada tingkat desa sehingga dapat meningkatkan kemampuan manajerial administrasi di level desa.

“Saya tahu betul desa itu unik sekali bahkan kadangkala ketika menurunkan uang ke desa namun pertanggungjawaban kepala desa masih susah,” jelas anggota Komisi V DPR Ridwan Bae dari Partai Golkar saat Raker dengan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan Djafar, di Gedung DPR, Selasa, (9/6).

Menurutnya, jika kita ingin jujur soal pengadaan Raskin, bisa dipastikan hampir 90 persen penyelenggara dipenjara karena pertanggungjawaban program yang lemah. “Jika kita mau kerja tentunya anggaran Rp. 1.4 Triliun untuk desa tertinggal sudah dapat mensejahterakan seluruh desa kita,” paparnya.

Dia menambahkan, pada tahap awal tentunya desa harus membangun infrastruktur jalan karena memang sulitnya akses menuju kesana yang membuat harga barang melonjak.

Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi V DPR dari Partai Gerindra Saiful Rasyid, dia mengatakan, masih banyak desa yang belum teraliri listrik. Artinya program Kementerian Desa belum mampu menjangkau seluruh desa yang ada. “Ada statement 15 ribu desa yang belum teraliri listrik, mohon jika bagian upaya untuk memberdayakan desa kita harus segera melakukan investasi di desa, sesuai dengan program Kementerian Desa,” tandasnya.

Dia mengatakan, perlu adanya peningkatan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan ke depannya. Badan ini, jelasnya, dapat melakukan validasi terhadap desa yang memerlukan terpaan dana desa nantinya. “Saya berharap pemberdayaan Balitbang diantaranya melakukan validasi program desa nantinya,” paparnya. (Si) foto:ray/parle/ry

Kemenristekdikti Diminta Tingkatkan Besaran Beasiswa Bidikmisi

Komisi X DPR RI mendorong Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan besaran Beasiswa, khususnya untuk Perguruan Tinggi Swasta. Pasalnya, beasiswa untuk mahasiswa PTS tidak sebanding dengan beban biaya kuliah, sehingga banyak PTS yang tidak mengambil beasiswa itu.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sohibul Iman, usai rapat kerja dengan Menristekdikti Mohammad Nasir, di ruang rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Senin (8/06).

“Besaran beasiswa Bidikmisi ini sudah ditetapkan, seperti biaya kuliah dan biaya hidup mahasiswa. Namun nilai beasiswa ini terlalu kecil untuk biaya berkuliah di PTS, sehingga banyak PTS tidak mengambil bantuan itu. Karena resikonya harus membayar kekurangan biaya,” jelas Sohibul.

Politisi F-PKS ini memberi contoh. Misalnya biaya kuliah dan biaya hidup sebesar Rp 1,5 juta. Sementara beasiswa Bidikmisi yang diberikan hanya Rp 1 juta. Berarti, PTS harus



Pimpinan Komisi X DPR

membayar biaya kekurangan sebesar Rp 500 ribu.

“Kalau bantuan beasiswa itu diambil kan berarti PTS itu harus memberi subsidi tambahan. PTS harus *nombok*. Karena itu PTS ini tidak mau mengambil beasiswa itu. Lebih baik mereka (PTS, red) menerima mahasiswa yang tidak menerima Bidikmisi,” imbuh Politisi asal Dapil Jawa Barat XI ini.

Untuk itu, Sohibul mengusulkan agar besaran beasiswa Bidikmisi untuk PTS ditingkatkan. Sehingga beasiswa tetap dapat disalurkan. Namun, Pemerintah sepertinya masih keberatan dengan usulan ini.

“Saya usulkan untuk dapat meningkatkan besaran beasiswa Bidikmisi untuk PTS. Namun sepertinya Pemerintah keberatan. Karena tentunya ini butuh kajian lebih mendalam,” imbuh Mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2009-

2014 itu.

Menanggapi usulan ini, Menristekdikti menyatakan bahwa selama ini yang menjadi permasalahan adalah PTS tidak mau menerima bantuan Beasiswa Bidikmisi, sehingga dialihkan ke PTN. Terkait besarnya, ia agak keberatan. Mengingat, harus ada penyesuaian besaran beasiswa juga di PTN.

“Jika diubah besarnya untuk PTS, harus mengubah juga yang di PTN,” jawab Nasir.

Sebelumnya, Nasir menjelaskan, pada tahun 2015, kuota beasiswa Bidikmisi sebanyak 60 ribu mahasiswa, dengan pendaftar 206.623. sementara pada tahun 2014, kuota yang diberikan sebesar 63.080 mahasiswa, dengan pendaftar sebanyak 323.259 mahasiswa. (sf)/foto: naefuroji/parle/iw.

DPR Dorong Pemerintah Bongkar Ijazah Palsu



Suasana rapat Komisi X dengan Menristek Dikti

Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk membongkar fenomena maraknya peredaran ijazah palsu. Pasalnya, fenomena ini cukup meresahkan masyarakat.

“Kami mendorong langkah yang dilakukan Kemenristekdikti untuk membongkar ijazah palsu. Jangan berhenti mengungkap dan membongkar fenomena ini,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sohibul Iman, usai rapat dengan Menristekdikti Mohamad Nasir, di ruang rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Senin (8/06/15).

Politisi F-PKS ini juga meminta Kemenristekdikti untuk bekerjasama den-

gan penegak hukum untuk membongkar sindikat ijazah palsu ini. Sehingga, kasus ini betul-betul diproses secara hukum, dengan berlandaskan Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

“Di UU itu sudah jelas, jika pelanggarnya apa, hukumannya apa. Ini harus ditegakkan betul. Menteri jangan takut mengungkap permasalahan ini, dan wajib kerjasama dengan penegak hukum. Ini bentuk dukungan dari Komisi X,” imbuh Sohibul.

Selama raker berlangsung, beberapa Anggota Komisi X sempat mengusulkan perlu dibentuk Panitia Kerja (Panja) untuk memberikan pengawasan kepada

Pemerintah selama proses pengungkapan kasus ijazah palsu ini.

“Memang ada wacana membentuk Panja. Namun kami lihat Pemerintah terlihat serius, kami dorong saja dulu. Jika Pemerintah terlihat kedodoran, baru kami bantu dengan Panja. Belum ada urgensi membentuk Panja Ijazah Palsu,” tukas Politisi asal Dapil Jawa Barat XI ini.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi X DPR RI Rinto Subekti. Ia mengapresiasi berbagai langkah yang dilakukan Menristekdikti dalam membongkar kasus ijazah palsu ini. Ia mengaku, pihaknya akan memberi dukungan sepenuhnya kepada Menristekdikti.

“Saya apresiasi terhadap langkah Menristeksikti. Komisi X juga akan mendorong dan memberi *support* kepada Menristek. Sehingga, hal ini dapat dituntaskan,” tegas Rinto.

Politisi F-PD ini mensinyalir, sindikat ijazah palsu ini sudah cukup lama beredar di Indonesia. Namun, untuk membuktikannya memang diperlukan pengusutan secara tuntas. Ia juga meminta Menristek untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

“Mungkin peredarannya sudah lama. Tapi untuk pembuktiannya ini membutuhkan terobosan yang signifikan. Menteri juga harus bekerjasama dengan para penegak hukum, maupun Menteri terkait, termasuk DPR, sehingga permasalahan ijazah palsu ini dapat terbongkar sampai ke akar-akarnya,” tegas Politisi asal Jawa Tengah IV ini.

Rinto menegaskan, jika memang ada Perguruan Tinggi yang memang sengaja membuat ijazah palsu, ia meminta agar PT tersebut ditutup. Namun, jika pembuatan ijazah palsu ini dilakukan

oleh segelintir oknum, oknum tersebut harus dipidanakan.

“Kita harus bergandengan tangan untuk membongkar permasalahan ini. Bukan hanya DPR atau Menristek

saja, namun juga seluruh pihak yang berkepentingan. Karena ini permasalahan mendasar terkait kompetensi dan moral bangsa Indonesia. Saya berharap, ini sebagai batu loncatan agar

pendidikan Indonesia semakin bermutu, dan kualitas pendidikan Indonesia semakin mumpuni,” harap Rinto. (sf) / foto:naefurodji/parle/iw.

Kementan Didesak Tingkatkan Kinerja Wujudkan Kedaulatan Pangan

Komisi IV DPR RI bidang Pertanian, menginginkan peningkatan kualitas kinerja Kementerian Pertanian sehingga terwujud kedaulatan pangan. Hal itu mengemuka dalam Raker Komisi IV DPR dipimpin Ketuaanya Edhi Prabowo dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Senin (8/6), di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.

Dalam raker yang dihadiri 45 Anggota dari jumlah 50 Anggota, Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas serapan APBN Kementerian Pertanian. Sampai dengan tanggal 7 Juni 2015 sebesar Rp6,271 triliun atau 39,49% dari pagu APBN Tahun 2015 sebesar Rp15,879 triliun. membahas RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga) Tahun 2015 dan RKP Kementerian Pertanian Tahun 2016.

Pada acara ini, Komisi IV menyetujui usulan Kementerian Pertanian atas revisi anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015 berupa pergeseran anggaran sejumlah Rp.888 milyar, yang terdiri dari pergeseran di dalam program sebesar Rp.431.036.365.000,- dan pergeseran antar program sebesar Rp.456.963.635.000,-.

“Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian segera merealisasikan anggaran untuk proyek percontohan asuransi pertanian Tahun 2015 sebesar Rp.150 milyar,” kata politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas pagu indikatif APBN Kementerian Pertanian Tahun 2016 sebesar Rp.30,1 triliun, serta menerima usulan penambahan anggaran sebe-



Suasana rapat Komisi IV DPR dengan Kementan

sar Rp.14,851 triliun.

Selain itu, Komisi IV menerima usulan Kementerian Pertanian mengenai rancangan anggaran subsidi pupuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp37,5 triliun yang terdiri dari subsidi pupuk tahun 2016 sebesar Rp30 triliun dan pelunasan kurang bayar tahun 2014 sebesar Rp7,4 triliun.

Komisi IV DPR RI akan membahas lebih lanjut mengenai rancangan subsidi pupuk tersebut sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan. (as) foto:ray/parle/ry

Penyerapan Anggaran Minim Karena Dana Masih di Menkeu



Suasana rapat Komisi VIII dengan Kepala BNPB

Anggota Komisi VIII DPR RI, Kuswiyanto menilai realitis penyerapan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2015 hingga saat ini masih sebesar 16 persen dari anggaran yang ditetapkan. Hal tersebut diungkapkannya usai Rapat kerja Komisi VIII dengan Kepala BNPB Syamsul Ma'arif, Senin (8/6) di ruang rapat Komisi VIII, Senayan Jakarta.

“Berdasarkan penjelasan dari Kepala BNPB tadi penyerapan 16 persen itu saya kira cukup realistis, karena memang uangnya tidak berada di BNPB, melainkan masih tersimpan di Kementerian Keuangan. Jika duit itu di BNPB maka tentu penyerapannya bisa dipercepat, yakni dengan menjalankan berbagai program yang telah disusun BNPB,” papar Kus, begitu ia biasa disapa.



Politisi dari Fraksi PAN ini malah sebaliknya mempertanyakan manajemen keuangan Negara kita ini. Pasalnya, tidak sedikit program-program BNPB dan Kementerian lain yang terlantar karena kebijakan Kementerian Keuangan. Mestinya, Menteri keuangan menjelaskan kepada seluruh komisi, termasuk Komisi VIII ada apa sesungguhnya yang terjadi di negara kita ini.

“Program pemulihan pasca bencana seperti di Sinabung misalnya. Hingga saat ini pembuatan rumah korban bencana belum sampai setengah dari jumlah yang ada. Begitupun banjir di Jakarta, serta berbagai daerah lainnya. Belum lagi pembangunan infrastruktur lainnya yang terkena dampak bencana,” ungkapnya.

Ia tidak yakin segala target dan program tersebut dapat terwujud jika

dana yang sudah dianggarkan muncul pada akhir tahun. Sementara, saat ini sudah akan dibahas APBN 2016 dan nota sudah disampaikan Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu. Untuk menghindari ketidaktercapaian target dan program tersebut, Kuswiyanto berharap agar Menteri Keuangan segera mencairkan anggaran BNPB dan Kementerian/ Lembaga lainnya. (Ayu)/foto:andri/parle/iw.

Pergiliran Jabatan Panglima TNI Patut Dipertahankan

Komisi I DPR RI menilai kebijakan menggilirkan jabatan Panglima TNI kepada tiga matra Angkatan Darat, Laut dan Udara patut dipertahankan. Kebijakan yang sudah dimulai sejak era Presiden Abdurrahman Wahid dan dilanjutkan sampai pada era Presiden SBY dinilai dapat membangun soliditas TNI.

“Jadi sesuatu yang sudah baik sebaiknya dilanjutkan, dipelihara saja. Pergiliran itu tetap dijaga supaya *solid*, tidak mungkin Panglima TNI diangkat dari darat saja atau laut saja. Jadi tradisi yang baik jabatan Panglima TNI digilirkan dari matra darat, laut, dan udara perlu untuk menjaga keseimbangan dan kebersamaan,” kata anggota Komisi I Darizat Basir usai Rapat Kerja dengan Panglima TNI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/15).

Politisi Fraksi Partai Demokrat yang juga mantan Komandan Kodim 506/Tgr DAM Jaya di Tangerang ini menambahkan dalam rapat tertutup dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko, ia telah menyampaikan hal ini. Walaupun keputusan akhir ada ditangan Presiden namun Panglima TNI tentu dapat menyampaikan masukan ini sebagai pejabat pembina, yang paling mengetahui rekam jejak bawahannya.

Sementara itu bicara pada kesempatan berbeda Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq mengatakan pergiliran Panglima TNI sudah dipayungi pada UU no.34/2004 tentang TNI. Dalam pasal 13 dijelaskan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala angkatan.



Suasana rapat Komisi I DPR dengan Panglima TNI

“Jadi dalam UU menjelaskan dapat bergantian, disitu spiritnya menghilangkan dominasi satu angkatan dengan angkatan lainnya,” papar politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Ia menambahkan memang tidak ada aturan yang secara eksplisit mengharuskan jabatan Panglima TNI digilir pada setiap angkatan, namun tradisi yang baik perlu terus dijaga. Apabila dilaksanakan maka pejabat pengganti Jenderal TNI Moeldoko yang memasuki masa pensiun, akan berasal dari TNI AU. (iky)/foto:andri/parle/iw.

DPR Dukung Target Pemerintah Datangkan 20 Juta Wisman

Komisi X DPR mendukung kesiapan pemerintah yang menargetkan 20 juta turis mancanegara datang ke Indonesia pada tahun 2019, dari tiga daerah yaitu Jakarta, Bali dan Batam yang menjadi target tujuan wisatawan asing.

Karena itu Komisi X DPR melakukan

kunjungan kerja ke Kepulauan Riau dan ternyata setelah melihat langsung ke P. Batam daerah ini sudah sangat siap dalam menjalankan program pemerintah tersebut. Komisi X DPR setelah mendengar pemaparan Gubernur dan melakukan tinjauan lapangan ke Batam baru-baru ini, di daerah ini hotel

cukup banyak dan juga terdapat dua Lapangan Udara Internasional.

Karena itu Wakil Ketua Komisi X DPR dari F-Gerindra Nuroji menyatakan yakin program pemerintah itu bisa terwujud. Lebih lanjut Nuroji mengatakan, dari paparan gubernur menurutnya ada beberapa kendala di-



Komisi X DPR saat melakukan kunjungan kerja ke Kepri

antaranya masalah Kepres 180 tentang kunjungan kapal asing yang datang ke Indonesia, belum terealisasi dan terimplementasi dengan baik.

Masalah visa yang dibebaskan untuk para wisatawan asing, Nuroji memandang hal itu sangat baik bagi program pemerintah dalam mendorong ma-

suknya wisman ke Indonesia apa lagi 30 negara sudah dibuka bebas visa. Sedangkan untuk pengamanan ketika wisatawan asing ke Indonesia itu harus melewati tiga instansi disarankan bisa dibuat satu pintu (imigrasi) saja.

Pada 2014 Indonesia hanya mencatatkan angka kunjungan wisman

sebanyak 9.435.411 atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebanyak 8.802.129 wisman.

Untuk itu Pimpinan Komisi X ini berharap perbaikan infrastruktur akan mendongkrak daya saing pariwisata Indonesia di tataran global yang saat ini berada di peringkat 70 ke peringkat 30 dunia pada 2019 nanti.

Dengan angka pertumbuhan tersebut, Nuroji mengatakan industri pariwisata Indonesia sudah terus tumbuh karena lebih tinggi dari angka rata-rata pertumbuhan pariwisata dunia sebesar 4,7 persen. Sementara pemerintah menargetkan untuk menggaet 20 juta wisman pada 2019 nanti.

Ditambahkan Nuroji, untuk mewujudkan target wisman pada 2019, tidak cukup hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, namun pemerintah perlu menyiapkan strategi yang harus dilakukan antara lain memperbaiki infrastruktur pariwisata, infrastruktur ICT (*Information and Communication Technology*), kebersihan dan higienitas serta mempermudah akses dan konektivitas ke daerah-daerah tujuan wisata. (And)/foto:andri/parle/iw.



Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay

Komisi VIII DPR meminta Kementerian Agama RI agar arif dan bijaksana dalam penetapan awal puasa dan lebaran. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggelar sidang itsbat secara tertutup. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan baru-baru ini.

“Tidak semua anggota masyarakat

Komisi VIII DPR Minta Sidang Itsbat Tertutup

memahami perbedaan yang mungkin terjadi dalam sidang itsbat. Karena itu, biarlah persoalan itsbat awal Ramadhan menjadi konsumsi tokoh-tokoh agama yang memahami ilmu falaq secara baik,” ungkap Saleh.

Namun ia mendengar awal Ramadan dan Idul Fitri tahun ini diperkirakan tidak akan ada perbedaan. Hampir semua ormas Islam akan menetapkan awal Ramadan dan Lebaran secara bersamaan.

Pada tahun-tahun sebelumnya, sidang itsbat kerap disiarkan secara langsung di TV. Hal tersebut bagus untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat seputar penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri. Sayangnya, sidang itsbat sering kali menyisakan perdebatan di tengah masyarakat. Tidak jarang, ada kelompok masyarakat yang menyalahkan kelompok masyarakat yang lain. Padahal, argumen penetapan awal Ramadan dan lebaran

yang berbeda itu belum tentu mereka pahami.

“Kadang ada juga ada kalimat-kalimat yang tidak bijak keluar dari peserta sidang itsbat. Akibatnya, ada kelompok lain yang berbeda pandangan merasa diadili dan dianggap salah. Padahal, pandangan mereka juga memiliki dasar dan rujukan syar’i yang dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Politisi dari Fraksi PAN ini.

Oleh karena itu dalam RDP dengan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI beberapa hari lalu, Komisi VIII meminta sidang itsbat dilakukan secara tertutup. Lebih lanjut Saleh berharap agar pemerintah dapat menjadi fasilitator yang baik dan adil bagi seluruh umat beragama. Jikapun ada perbedaan, Kementerian Agama tidak boleh terlihat berpihak pada satu kelompok tertentu. (Ayu)/foto:iwan armianas/parle/iw.



Dukung Industri Kreatif, DPR Bentuk Panja MEA



Wakil Ketua BKSAP Teguh Juwarno

Ketua Panja Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) BKSAP DPR RI Teguh Juwarno mengatakan, wujud peran serta Parlemen dalam percepatan perwujudan MEA sebagai ruang dialog bagi anggota Panja dalam membuat legislasi dan melakukan pengawasan guna menjamin efektifitas implementasi MEA.

“Dalam pandangan kami industri kreatif dapat menjadi salah satu strategi kesuksesan Indonesia dalam meningkatkan kompetensi nasional menghadapi Komunitas Ekonomi Asean 2015,” jelas Wakil Ketua BKSAP ini dalam siaran Persnya saat Diskusi dengan jajaran Industri kreatif, akademisi dan pemerintah di Jakarta, Kamis, (11/6).

Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dari sisi kreatifitas, seni budaya dan pariwisata yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi sektor unggulan. Selain itu Indonesia juga dianugerahi bonus demografis yang ditandai dengan jumlah anak muda kreatif di daerah urban yang didukung oleh infrastruktur konektivitas menjadi salah satu faktor yang memperkuat potensi ekonomi kreatif di Indonesia.

“Kita harapkan melalui diskusi dapat diperoleh rekomendasi mengenai kebijakan yang diperlukan dalam upaya mendukung pertumbuhan industri kecil dan menengah

(IKM) berbasis ekonomi kreatif di tengah arus liberalisasi perdagangan,” jelasnya.

Menurutnya, rekomendasi ini nanti akan bermanfaat bagi anggota Panja dalam penyusunan program kerja tahun 2015 sekaligus mendukung peran parlemen untuk menjalankan fungsi legislasi dan ratifikasi peraturan perundangan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi kreatif.

Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif Harry Waluyo mengatakan, ekonomi kreatif itu berkontribusi sekitar 80 persen bagi pertumbuhan ekonomi dunia. “Jadi Kunci utama ekonomi kreatif pada manusianya,” jelasnya.

Dorong Legislasi Yang Terintegrasi

Pada kesempatan yang sama, Panja MEA mendorong dan mengantisipasi hadirnya MEA yang terintegrasi dari sisi fungsi Dewan khususnya Legislasi dalam memproteksi produk dalam negeri, SDM maupun SDA Indonesia.

“Panja MEA merupakan bentukan lintas Komisi dan kita ingin mendorong bagaimana kita diharapkan dapat mengantisipasi hadirnya MEA yang terintegrasi secara legislasi,” jelas Teguh.

Selain itu, lanjutnya, Parlemen Indonesia merupakan bagian dari Parlemen Asean mendukung industri kreatif di kawasan. “Kita juga akan mengusulkan dan mendorong hak paten Asean, selain itu ada semacam traktat kerjasama di Asean yang harus didorong,” paparnya.

Pemerintah, paparnya, jangan terlalu mempersulit aturan yang ada, selain itu perlu memfasilitasi para pelaku industri yang akan berkembang. “Jadi tidak perlu dikasih kail misalnya dalam mengurus paten dunia misalnya saja pemerintah Indonesia dapat membiayai 20 paten terbaik Indonesia untuk didaftarkan. Hal ini diharapkan dapat menjadi sebuah stimulan,” tandasnya.

Teguh menambahkan, para diplomat juga harus mendorong diplomasi bukan hanya dari sisi politik saja tetapi juga diplomasi ekonomi. Kita tidak perlu takut dengan MEA. Kita bisa hadapi dengan industri kita seperti musik, film, aplikasi maupun kuliner dan harus didorong penuh,” terangnya. (Si)

foto: eka hindra/parle/hr

Asuransi, Penjaminan dan Permodalan Nelayan Akan Diatur Dalam UU

Negara harus hadir untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali Nelayan baik nelayan laut maupun nelayan tangkap atau pembudidaya ikan. Diantaranya lewat sebuah asuransi nelayan serta penjaminan permodalan.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga saat mengunjungi Balai Benih Ikan Air Tawar di Batimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (11/6).

“Selama ini tidak ada asuransi yang bersedia memberikan perlindungan bagi nelayan, dengan alasan resiko terlalu besar sementara jikapun asuransi itu ada nelayan sendiri tidak sanggup membayar premi asuransi. Ini sebenarnya menjadi tanggung jawab negara untuk membayarkan premi tersebut, sehingga ketika berada di laut nelayan akan terlindungi, begitupun dengan nelayan tangkap atau pembudidaya ikan, jika bencana datang yang menyebabkan



Tim Komisi IV DPR saat pertemuan dengan Rektor Unhas

gagal panen,” ungkap Yoga.

Begitupun dengan penjaminan permodalan. Selama ini tidak sedikit pembudidaya ikan yang tidak mampu

mengembangkan usahanya, bahkan terpaksa gulung tikar karena kurangnya permodalan. Bank tidak bersedia menjamin karena memang kebanyakan nelayan tidak memiliki sertifikat rumah sebagai agunan pinjaman. Kondisi tersebut membuat nelayan semakin terbelakang hingga dari tahun ke tahun selalu berdekatan dengan kemiskinan.

“Semua permasalahan nelayan tersebut akan dimasukkan dalam RUU Perlindungan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan ini sehingga akan terlihat dengan jelas solusinya. Dengan begitu tidak akan lagi nelayan yang kesulitan dalam permodalan dan penjaminan. Dan akhirnya kehidupan nelayan akan meningkat,” tambah Politis dari Fraksi PAN ini.

Meski demikian Yoga mengaku belum menemukan rumusan yang tepat bagi penjaminan dan permodalan serta asuransi bagi nelayan tersebut, apakah akan berbentuk perorangan atau tergabung dalam sebuah kelompok usaha nelayan. Oleh karena itu, dikatakannya Komisi IV akan terus menampung masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan RUU tersebut. (Ayu) foto: ayu/parle/od

Wajib Belajar 9 Tahun Perlu Dievaluasi



Anggota Komisi X Sutan Adil Hendra

Wajib Belajar 9 Tahun dirasa masih belum merata dan berkeadilan. Belum semua daerah merasakan pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama. Sehingga, program Wajib

Belajar 9 Tahun ini perlu dievaluasi.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi X Sutan Adil Hendra usai Rapat Kerja antara Komisi X dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, di ruang rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Rabu (10/06/15).

“Misalnya di Provinsi Jambi, pendidikan di desa itu masih sangat minim. Belum tentu ada Sekolah Dasar (SD) di setiap desanya. Sementara sekarang kita sudah bermimpi untuk program wajib belajar 12 tahun. Saya punya ide dan pemikiran, kita tuntaskan dulu wajib belajar 9 tahun. Jangan mencari program pencitraan saja,” tegas Sutan.

Politisi F-Gerindra ini meminta agar Mendikbud mengevaluasi program wajib belajar 9 tahun terlebih dahulu. Terutama, pendidikan itu harus merata

dan adil. Apalagi, setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan yang sama, dimanapun keberadaannya. Jika sudah tuntas, baru kemudian meningkat ke wajib belajar 12 tahun.

“Program wajib belajar 9 tahun ini perlu dievaluasi dulu. Apakah sudah merata dan berkeadilan. Apalagi, jika menjadi wajib belajar 12 tahun, ini berkaitan juga dengan anggaran. Alangkah lebih baik tuntas dulu yang 9 tahun, baru meningkat pola 12 tahun,” cetus Politisi asal Dapil Jambi ini.

Sebelumnya, Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, Angka Partisipasi Kasar pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama dan setingkat, mencapai 96,91 persen. Namun, masih ada 177 Kabupaten dan Kota yang nilai APK-nya masih di bawah 95 persen. (sf) foto: naefuroji/parle/od

Gubernur DIY Dukung DPR Tuntaskan RUU Kebudayaan

Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI mengadakan pertemuan dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X membahas sejumlah isu terkait RUU

Kebudayaan. Dalam pertemuan tersebut komisi yang membidangi masalah pendidikan dan kebudayaan ini mendapat dukungan untuk menuntaskan produk legislasi yang sudah

bergulir sejak periode 2009-2014 ini.

“Dalam pertemuan lebih dari dua jam tadi Pak Gubernur menyampaikan dukungannya agar RUU Kebudayaan bisa segera diselesaikan karena ini

penting bagi langkah bangsa ke depan. Beliau juga siap menjadi nara sumber kapan saja diperlukan termasuk apabila diperlukan untuk datang ke Jakarta,” kata Ketua Tim Kunspe Komisi X Ridwan Hisyam kepada wartawan di Yogyakarta, Kamis (4/6/15).

Politisi Fraksi Golkar ini menerima baik agar penuntasan RUU tidak perlu menunggu sampai seluruh pasal menjadi sempurna. “Ini masukan yang bagus juga, kalau menunggu ideal tidak akan pernah selesai. Kita ingin segera tuntas,” papar dia.

Ridwan yang juga Wakil Ketua Komisi X ini membenarkan ada ironi dalam aturan perundang-undangan terkait kebudayaan. Saat ini sejumlah produk legislasi diantaranya UU Cagar Budaya, UU Bahasa, UU Perfilman telah berhasil diselesaikan, sementara payung besarnya yang seharusnya menjadi rujukan yaitu UU Kebudayaan mandeg.

Dalam kesempatan itu Sultan juga menyampaikan catatan penting untuk mengubah cara pandang bangsa dari



Tim Komisi X DPR berpose dengan Gubernur DIY

budaya yang cenderung berorientasi kontinental menjadi maritim. Bahkan setelah proses amandemen UUD NRI 1945 keempat masalah kemaritiman masih belum menjadi perhatian bangsa.

“Kita ini negara maritim tapi budaya hidup kita menjauhkan kita dari kema-

ritiman. Kalau sejak awal kita menjadikan deklarasi Juanda sebagai rujukan maka hal ini tentu tidak akan terjadi karena konvensi internasional sudah mengakui bahwa Indonesia adalah negara maritim,” demikian Gubernur.

(iky) foto: ibnur khalid/parle/iky

Raker Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM hujan Interupsi



Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian

Agenda Raker yang sedianya membahas penyampaian RKP dan RKAKL Kementerian ESDM tahun 2015, serta asumsi dasar di Sektor Migas dan RAPBN 2016, diwarnai hujan interupsi oleh anggota Komisi VII DPR yang mempertanyakan ketidakhadiran Menteri ESDM Sudirman Said dalam Raker yang lalu.

“Ketidakhadiran Menteri ESDM, terkesan adanya *Contempt of Parliament*, maksudnya ada usaha untuk mengha-

langi tugas parlemen baik langsung maupun tidak langsung menghalangi tugas Komisi VII DPR dalam menjalankan tatib DPR,” ujar anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian dari Partai Gerindra, saat Raker dengan Menteri ESDM Sudirman Said dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika, di Gedung Nusantara I, Senin, (9/6).

Menurutnya, kurang lebih 4 kali Menteri ESDM tidak hadir saat diundang oleh Komisi VII DPR dengan berbagai alasannya. “Ketidakhadiran raker sampai 4 atau 5 kali perlu diklarifikasi, selain juga terkait pembubaran Petral,” paparnya.

Terkait kunjungan Panja Migas ke Pertamina, lanjut Ramson, Panja Migas sebagai bagian yang sudah diatur sesuai konstitusi sudah siap berangkat ke Pertamina, namun saat kunjungan tersebut tidak adanya sambutan, serta tidak mendapatkan data terkait pembubaran Petral, ini menimbulkan adanya niat menghalangi kerja DPR RI.

“Kita awalnya ingin mengecek data Integrated Suplai Chain (ISC) pengganti Petral. Namun saat disana kita tidak jelas, dan tidak mendapat informasi terkait data ISC tersebut. Ini bukan soal pribadi tetapi DPR sebagai suatu lembaga merasa dilecehkan tolong jelaskan jangan sampai terjadi hal *contempt of parliament*,” jelasnya. (Si) Foto: Naefuroji/parle/od



Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menkumham membahas RKA-KL, Rabu (10/06)
Foto: Andri/Parle/HR



Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Kepala BPS, Kepala BPKP, dan Kepala LKPP membahas RKA-KL, Kamis (11/06) Foto: Naefuroji/Parle/HR



Komisi V DPR RI Raker dengan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan Djafar, di Gedung DPR, Selasa, (9/6) Foto: Rizka/Parle/HR